

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Faktor utama penyebab menurunnya kualitas jurnalisme Indonesia adalah maraknya pelanggaran pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang dilakukan oleh jurnalis. Kode Etik Jurnalistik ini telah difasilitasi dan disepakati oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, bertujuan sebagai “landasan moral dan etika profesi” yang menjadi pedoman operasional bagi jurnalis Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan profesionalisme dan integritas (Dewan Pers, 2017:35). Penurunan kualitas ini semakin diperkuat dengan berkembangnya jurnalisme daring. Alih-alih menjadi pencerahan di tengah keterpurukan jurnalisme media konvensional, justru menambah kerumitan masalah (Ambardi, 2017:86). Bertambahnya media membuat informasi semakin mudah disebar dan diterima. Semua media daring berlomba-lomba menyampaikan informasi dengan cepat, tak jarang mereka mengabaikan kelengkapan informasi yang didapat. Selain itu, tak sedikit juga media yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan kabar hoaks.

Media daring di Indonesia berkembang sangat cepat. Total jumlah media di Indonesia pada 2016-2019 diperkirakan mencapai angka 47.000 media. Jumlah tersebut dibagi atas: 43.300 media daring, 2.000-3.000 media cetak, dan sisanya adalah media siaran seperti, radio dan stasiun TV yang memiliki siaran berita (Prasetyo, 2018:4). Sama halnya dengan jurnalisme media konvensional, jurnalisme media daring juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan berita yang berkualitas. Melihat jumlah media daring yang tidak sedikit, membuat persaingan media semakin ketat dan tidak banyak media yang mementingkan kualitas informasi untuk disajikan ke publik. Berangkat dari permasalahan inilah, sebagai lembaga yang menaungi aktivitas pers di Indonesia, Dewan Pers melakukan verifikasi kepada perusahaan media, guna menjamin masyarakat menerima informasi yang valid. Verifikasi media merupakan bagian penting

sebagai proses dari pemeriksaan media untuk menjamin informasi dan data yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan pers ke Dewan Pers, sudah sesuai, sudah benar atau tidak sesuai, dan tidak benar, serta sebagai suatu proses pembuktian secara faktual (Prasetyo, 2018:2). Berdasarkan data verifikasi perusahaan media di Dewan Pers, yang tercatat sebagai media profesional dan lolos verifikasi hingga akhir 2018 ini baru 2.400 perusahaan pers (Prasetyo, 2018:4). Pada Januari hingga November 2020, jumlah media yang terverifikasi bertambah. Total jumlah media terverifikasi administratif sebanyak 233 media, dan yang terverifikasi faktual sebanyak 119 media (Djauhar, 2020:3). Media-media tersebut, terdiri dari media cetak, media daring, radio, dan televisi. Jumlah masing-masing media yang telah disebutkan di atas, akan dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1.1 DATA MEDIA TERVERIFIKASI (JANUARI-NOVEMBER 2020)

Jenis Media	Terverifikasi Faktual	Terverifikasi Administratif
Cetak	31	69
Siber/daring	85	169
Radio	0	2
Televisi	3	3
Total	119	233

Sumber: ETIKA November 2020

Peran pembaca sangat dibutuhkan untuk dapat memilah dengan baik pemberitaan yang valid, agar tidak percaya begitu saja dengan pemberitaan dari satu sumber. Pembaca perlu melakukan pembandingan dengan mencari berita yang serupa di media lain. Karena, walaupun kabar peristiwa yang disajikan sama, namun setiap media akan mengemasnya dengan pengemasan yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh subjektivitas penulis yang dalam kegiatan ini disebut jurnalis, dan dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media. Sama halnya dengan media cetak dan penyiaran, media daring pun memberitakan beragam isu atau peristiwa yang terjadi. Seperti isu politik, hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pemberitaan yang sifatnya menghibur. Perbedaan yang paling menonjol antara media daring dengan media konvensional adalah

pada kecepatan, dan kemudahan dalam mengakses atau menyampaikan informasi.

Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah kasus korupsi. Selalu saja ada kasus korupsi setiap tahunnya dan tetap menjadi sorotan karena menyangkut hak seluruh rakyat Indonesia. Anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, justru dipakai untuk kepentingan pribadi oleh oknum penguasa yang tidak bermoral. Tahun 2018 menjadi tahun dengan kasus tindak korupsi terbanyak sepanjang berdirinya KPK. Tercatat total kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia berjumlah 260 kasus berdasarkan profesi/jabatan (KPK, Graph TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan, 2018), untuk TPK jenis perkara total tercatat 199 kasus. Pada tahun 2018 terjadi 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan total 121 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, dan total bukti Rp 24,4 miliar (KPK, Laporan Tahunan KPK 2018, 2018). Berdasarkan data KPK tahun 2018, tindak pidana korupsi yang terjadi berdasarkan jenis profesi atau jabatan, paling banyak dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, yaitu 103 kasus. Sedangkan berdasarkan jenis perkara yang banyak terjadi adalah penyuapan dengan total 168 kasus suap (KPK, Graph TPK Berdasarkan Jenis Perkara, 2018). Namun kasus tindak korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah saja, tetapi juga terjadi di perusahaan atau lembaga swasta, dan di perusahaan-perusahaan milik BUMN. Total kasus korupsi yang melibatkan BUMN mencapai angka 60 kasus yang ditangani oleh KPK. 19 dari 60 kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 31,1 triliun (Angriani, 2019). Data terbaru yang peneliti dapatkan, total kasus korupsi yang melibatkan BUMN di tahun 2020 adalah 86 kasus. Selain ditangani oleh KPK kasus korupsi pada perusahaan milik BUMN ada juga yang ditangani oleh kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Salah satu kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia, yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di tahun 2020 adalah kasus dugaan tindak korupsi asuransi jiwa pada perusahaan milik BUMN, yakni PT. Asuransi Jiwasraya. Selain Jiwasraya, terdapat tiga kasus lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, diantaranya (Gunadha, & Bhayangkara, 2020):

1. Kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali oleh Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Pinangki. Pinangki diduga telah menerima suap sebesar Rp 7 miliar atau USD 500 ribu, terkait dengan pengajuan peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra dalam kasus *cessie* Bank Bali.
2. Kasus berikutnya adalah kasus tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi pada kasus korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Danareksa Sekuritas kepada PT Evio Sekuritas pada 2014-2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga lebih dari Rp 105 miliar.
3. Kasus ketiga adalah kasus tentang dugaan tindak korupsi pada importasi tekstil di Dirjen Bea dan Cukai pada tahun 2018-2020, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun.

PT Asuransi Jiwasraya atau akrabnya disebut Jiwasraya, merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua milik Indonesia, yang dikabarkan korupsi dana nasabah. Asuransi jiwa pelat merah ini didirikan pada 31 Desember 1859 oleh seorang ahli keuangan dan investasi asal Belanda, C.F.W. Wiggers van Kerchem. Di masa kolonial Belanda, asuransi jiwa ini bernama *Nederlandsch-Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij*. Kasus Jiwasraya mencuat ke publik setelah adanya pernyataan bahwa terjadi penundaan pembayaran polis yang jatuh tempo sebesar 802 Miliar pada 1 Oktober 2018, oleh manajemen Jiwasraya. Hal ini dikarenakan Jiwasraya sedang menghadapi tekanan likuiditas, yang disebabkan oleh salah satu produknya, yakni JS Saving Plan yang banyak menempatkan investasi di pasar modal. Produk ini dipasarkan melalui perbankan (*bancassurance*). Pada November 2019, Rini Soemarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah menjabat pada periode 2014-2019, melaporkan masalah Jiwasraya ke Kejaksaan Agung, atas dugaan adanya kecurangan (*fraud*) di PT Asuransi Jiwasraya, yang didasari pada penemuan laporan keuangan yang dikelola secara tidak transparan. Permasalahan ini membuat BUMN mengganti Direktur Utama Jiwasraya, yang sebelumnya dipimpin oleh Asmawi Syam. Asmawi Syam resmi dilantik pada Mei 2018. Namun karena masalah Jiwasraya muncul ditahun kepemimpinannya, pihak

BUMN akhirnya menunjuk Hexana Tri Sasongko untuk menggantikan posisi Asmawi Syam. Hexana resmi menjabat pada November 2018. Banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus ini, diantaranya Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tentu saja Kementerian BUMN selaku pemilik asuransi ini. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung juga berupaya agar kasus ini bisa terkuak sampai ke akar, agar bisa memberikan ganjaran kepada para oknum yang telah merugikan para nasabah Jiwasraya.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, permasalahan Jiwasraya tidak hanya sampai disitu saja. Pihak BUMN menemukan fakta bahwa manajemen Jiwasraya berinvestasi di “saham gorengan”. Fakta ini juga dibenarkan oleh BPK. Penyelidikan terus dilakukan Kejaksaan Agung, hingga ditemukan dugaan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya. Pada Januari 2020 ditetapkanlah tujuh saksi ke dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Tujuh saksi tersebut yakni Goklas AR Tambunan sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia, Vera Florida sebagai Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy sebagai Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Endra Febri Setyawan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia, Lies Lilia Jamin sebagai Mantan Direktur PT OSO Manajemen Investasi, Adi Pratomo Aryanto dan Syahmirwan sebagai Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Pihak Kejaksaan Agung, terus menyelidiki kasus Jiwasraya guna memperoleh bukti-bukti yang akan digunakan untuk menemukan tersangka dalam kasus ini (Habibie, 2020).

Setelah peneliti mengumpulkan data-data dan menelusuri kasus ini lebih dalam, ternyata permasalahan Jiwasraya sudah ada sejak tahun 2004. Saat itu beredar kabar bahwa asuransi ini membukukan laba semu. Laba semu merupakan laba atau keuntungan yang hanya berbentuk nominal di atas kertas saja, tidak sesuai dengan nominal yang ada dan diterima sesuai waktunya. Ternyata permasalahan Jiwasraya tidak hanya di situ saja, dugaan lainnya terus bermunculan. Hingga pada tahun 2016, BPK berhasil menemukan 16 temuan

yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis, pendapatan, biaya operasional, dan investasi dari 2014 hingga 2015. Ditemukan juga fakta Jiwasraya suka berinvestasi pada “saham gorengan”, yaitu istilah saham yang memiliki kualitas buruk, dan prosesnya telah direkayasa oleh pihak-pihak yang umumnya disebut “bandar saham”, tujuannya adalah agar para bandar saham ini dapat mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Kemudian penempatan saham pada investasi tersebut tidak didukung oleh pengkajian yang memadai. Di tahun yang sama, Jiwasraya telah diperingatkan karena memiliki risiko terhadap gagal bayar dalam bertransaksi investasi, dengan PT Hanson Internasional. Semua masalah itu juga didukung oleh tidak optimalnya Jiwasraya dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Pada tahun 2018, Jiwasraya melakukan pembukuan kerugian yang tidak diaudit sebesar 15,3 Triliun. Kerugian tersebut mengalami penurunan menjadi 13,7 triliun pada September 2019. Pada November 2019, Jiwasraya mengalami ekuitas negatif (*negative equity*) yaitu ketika terjadi nilai aset yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman kurang dari saldo pinjaman. *Negative equity* yang dialami Jiwasraya sebesar 27,2 triliun. Kemudian kasus Jiwasraya menjadi ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian publik hingga tahun 2020, karena adanya dugaan tindak korupsi di dalam Jiwasraya yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 17 Triliun. Isu ini tentu saja tak luput dari perhatian media. Semua media melaporkan pemberitaan terbaru tentang Jiwasraya setiap hari. Walaupun isu yang diberitakan sama, namun isi dari pemberitaan di satu media berbeda dengan media yang lain. Hal ini disebabkan karena saat melaporkan isu, setiap media mempunyai kemampuan yang berbeda-beda saat mengonstruksi realitas, selain itu karena tiap-tiap media mempunyai deologi yang berbeda.

Melihat kasus Jiwasraya yang kompleks, dan jumlah kerugian negara menyentuh angka 17 Triliun, membuat Jiwasraya menjadi salah satu kasus megakorupsi sepanjang sejarah Indonesia. Dalam proses pengusutan kasus ini, banyak pihak yang turun tangan. Segala upaya pun dilakukan demi mengusut tuntas kasus ini. Salah satu pihak yang turun tangan adalah DPR dengan membentuk Pansus (Panitia Khusus) Jiwasraya. Pansus Jiwasraya dibentuk oleh Komisi VI DPR. Hal ini tentunya menjadi sorotan, karena Komisi VI DPR membentuk khusus Pansus Jiwasraya hanya untuk mendalami kasus ini.

Peneliti mengumpulkan pemberitaan tentang kasus dugaan korupsi Jiwasraya, dan melakukan banding terhadap media *mainstream* yang sudah terverifikasi Dewan Pers, sejak awal pemberitaan kasus dari masing-masing media. Namun peneliti membatasi pemberitaannya hingga September 2020. Media yang peneliti pilih, ditentukan berdasarkan media yang lebih dulu memberitakan kasus ini, dan ditentukan dari jumlah pemberitaan terbanyak. Data-data tersebut peneliti lampirkan dalam bentuk table di bawah ini.

TABEL 2.2 DATA HASIL PENELUSURAN MEDIA DARING

NAMA MEDIA	AWAL PEMBERITAAN	JUMLAH
Cnbcindonesia.com	01 Januari 2018	1041
Okezone.com	15 Januari 2020	124
Detik.com	27 Desember 2019	460
Kompas.com	28 November 2019	57
liputan6.com	30 Januari 2019	164
Tribunnews.com	15 Januari 2020	37
Cnnindonesia.com	24 Juli 2020	3
Tirto.id	28 November 2019	75
Kumparan.com	25 November 2019	135
Tempo.co	23 Juni 2020	84

Olahan peneliti

Berdasarkan data di atas, peneliti memilih cbcindonesia.com sebagai media yang akan dianalisis. Hasil dari menelusuri berita di cbcindonesia.com, peneliti mendapatkan data bahwa cbcindonesia.com adalah media yang paling aktif dan paling banyak memberitakan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Cbcindonesia.com merupakan media media daring milik CNBC Indonesia, yang khusus membahas tentang ekonomi makro, pasar modal, perbankan, dan industri keuangan lainnya seperti: komoditas, manufaktur, ekonomi internasional, serta politik, hukum dan hankam yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional secara komprehensif. Media ini resmi berdiri pada Februari 2018, dibawah

payung CT Corp. Di tahun 2018 juga cnbcindonesia.com pertama kali mengangkat isu tentang kasus korupsi di Jiwasraya.

Ada begitu banyak pemberitaan mengenai dugaan korupsi Jiwasraya di cnbcindonesia.com, tentu tidak akan semua teks berita akan diteliti. Untuk memilih objek yang akan dianalisis, peneliti melakukan penelusuran dan mengumpulkan berita dari Januari 2020, waktu ditetapkannya tersangka hingga September 2020, waktu divonisnya para tersangka. Hasil penelusuran yang peneliti temukan adalah ketidakberimbangan berita tentang para tersangka terduga korupsi Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Hary Prasetyo, Joko Hartono Tirto, dan Hendrisman Rahim. Dari lima nama awal yang ditetapkan sebagai tersangka, cnbcindonesia.com lebih banyak memberitakan tentang Benny Tjokrosaputro (untuk seterusnya akan ditulis Bentjok). Bentjok mendapatkan sorotan lebih banyak dibanding empat tokoh lainnya, yakni Heru Hidayat sebagai Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Hary Prasetyo sebagai mantan Direktur Keuangan Jiwasraya yang menjabat pada periode Januari 2013-2018, Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya yang menjabat pada periode 2008-2018, Syahmirwan sebagai mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya dan Joko Hartono Tirto sebagai Direktur PT Maxima Integra. Dari data yang peneliti kumpulkan, jumlah total pemberitaan Bentjok mencapai 37 berita. Sementara tersangka lainnya yakni Heru Hidayat tujuh berita, Hary Prasetyo dua berita, Hendrisman Rahim tujuh berita tentang Jiwasraya, dan tidak ada satupun pemberitaan tentang Joko Hartono Tirto. Berdasarkan data tersebut, peneliti hanya akan menganalisis enam berita yang membahas tentang Bentjok. Adapun enam berita tersebut, peneliti lampirkan pada table di bawah ini.

*TABEL 1.3 ENAM BERITA BENTJOK DI CNBCINDONESIA.COM
(JANUARI – JUNI 2020)*

HEADLINE/JUDUL	TANGGAL
Jaksa Tidak Ungkap Alasan Penahanan Benny Tjokro	14 Januari 2020
Bentjok Cs Ditahan, Karena Jokowi Protes Soal “saham gorengan”?	15 Januari 2020

MTN Sudah Lunas, Benny Tjokro tak Punya Utang ke Jiwasraya	22 Januari 2020
Skandal Jiwasraya, Kuasa Hukum: Bentjok Dijadikan Tumbal!	24 Februari 2020
Bentjok: Saham Hanson Tak Bikin Jiwasraya Gagal Bayar	25 Februari 2020
Pembelaan Benny Tjokro: Saya Kambing Hitam, 100% Tak Bersalah	24 Juni 2020

Sumber: cnbcindonesia.com

Enam berita tentang Bentjok yang peneliti pilih di cnbcindonesia.com adalah berita-berita yang terlihat *frame*-nya untuk mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh cnbcindonesia.com, mencari aspek apa yang ditonjolkan, dan bagaimana kelengkapan isi dari berita tersebut dengan menggunakan metode Analisis Framing. Analisis Framing merupakan salah satu metode dalam menganalisis teks, yang masuk ke dalam kategori paradigma penelitian konstruksionis. Paradigma konstruksionis ini memandang sebuah realitas kehidupan sosial sebagai realitas yang dikonstruksi. Dalam studi komunikasi, paradigma ini sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna (Eriyanto, 2018:43). Penulis menganalisis *framing* berita-berita di atas dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini mendefinisikan *framing* sebagai strategi konstruksi dan memproses berita (Eriyanto, 2018:79). *Frame* merupakan sebuah ide yang dihubungkan dengan menggunakan elemen yang berbeda-beda dalam satu teks berita. Elemen yang dimaksud di sini merupakan kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu, ke dalam teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2018:293). Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi perangkat framing ini ke dalam empat struktur besar. Struktur pertama yakni Sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan cara jurnalis menyusun peristiwa-peristiwa ke dalam teks berita. Struktur kedua yakni Skrip. Skrip berhubungan dengan cara jurnalis mengisahkan peristiwa-peristiwa ke dalam bentuk teks berita. Struktur ketiga yakni Tematik. Tematik berhubungan dengan cara jurnalis menulis fakta menggunakan kalimat atau hubungan antarkalimat yang dapat membentuk teks berita secara menyeluruh. Struktur yang terakhir yaitu Retoris. Retoris berhubungan dengan cara jurnalis menekankan arti tertentu ke dalam teks berita. Oleh karena itu, untuk mengetahui

frame berita dari keenam teks berita di atas, maka penulis meneliti media ini dan mengangkat judul “**Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki tentang Berita PT Asuransi Jiwasraya di cnbcindonesia.com Periode Januari – Juni 2020**”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang ke dalam permasalahan yang lain, maka fokus dari penelitian ini terdapat pada cara cnbcindonesia.com membingkai salah satu tersangka kasus Jiwasraya yakni Bentjok, yang dipublikasikan pada Januari-Juni 2020. Pemilihan berita ini berdasarkan hasil dari penelusuran dan analisis tentang berita-berita kasus Jiwasraya di cnbcindonesia.com sejak awal pemberitaan kasus ini, yakni pada Januari 2018, hingga divonisnya lima tersangka pertama dalam kasus Jiwasraya, yakni pada September 2020.

1.3 Identifikasi Masalah

Bagaimana cnbcindonesia.com membingkai berita Bentjok sebagai pelaku dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dengan model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui bingkai berita Bentjok oleh cnbcindonesia.com dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dengan model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam memahami teori analisis *framing* dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, melalui studi kasus *framing* pemberitaan media dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya..

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dan masukan bagi pihak media daring, khususnya cnbcindonesia.com dalam menyajikan berita.

1.6 Waktu Penelitian

TABEL 1.4 WAKTU PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2020										Tahun 2021						
	Bulan										Bulan						
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
Mencari Topik																	
Pengumpulan Data																	
Pengumpulan Teori																	
Penyusunan Proposal																	
Analisis Data																	
Hasil Penelitian																	
Sidang Skripsi																	